

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA BIMA TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL KOTA BIMA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah Tuhan yang maha kuasa, Dinas Sosial Kota Bima dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan Dinas Sosial Kota Bima atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), baik yang bersifat administrasi maupun substantif dalam tahun 2021.

Dalam laporan ini diuraikan mengenai deskripsi umum tentang organisasi, permasalahan yang dihadapi sesuai TUPOKSI, Perencanaan Kinerja, dan Laporan Kinerja pada Dinas Sosial Kota Bima selama Tahun 2021. Oleh karena deksripsi dokumen LKIP ini sebagai perwujudan sikronisasi TUPOKSI SKPD, permasalahan SKPD dan Perencanaan Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja yang diukur sesuai standar yang ditetapkan pada Dinas Sosial Kota Bima untuk anggaran Tahun 2021.

Demikian penyusunan laporan kami buat dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih.

Bima, Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Ers. ABDUL GAWIS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631231 199103 1 181

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data umum organisasi.....	1
B. Aspek stratejik organisasi	1
C. Struktur organisasi.....	2
D. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	4
E. Sumber daya organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana stratejik organisasi	6
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial	11
C. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Realisasi Keuangan	38
BAB V PENUTUP	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Bima. Secara umum bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2021, diantaranya; *Pertama*, bahwa Dinas Sosial Kota Bima telah berhasil melaksanakan 4 (empat) program teknis yang terdiri dari 15 kegiatan yang dirincikan ke dalam 46 sub kegiatan yang ditetapkan sehingga berpengaruh pada peningkatan pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan; *Kedua*, bahwa jumlah anggaran dalam rangka peningkatan pencapaian anggaran pada Tahun 2021 sudah baik, dengan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar **Rp. 5.207.650.838,-** (*Lima miliar dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 4.950.296.618,00,-** (*Empat miliar Sembilan ratus lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah*). Serta dana dari APBN dan Dekonsentrasi bidang Kesejahteraan Sosial mencapai **Rp. 23.558.791.770,-** (*Dua Puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*), - dengan realisasi sebesar **Rp. 23.558.791.770,-** (*Dua Puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).- *Ketiga* bahwa dukungan sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) pada Dinas Sosial Kota Bima mampu meningkatkan pencapaian indikator sasaran strategis yang ada. Oleh karenanya dukungan sumber daya untuk peningkatan pencapaian indikator sasaran tersebut sangat mendukung peningkatan pencapaian indikator sasaran strategis tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Kedudukan Dinas Sosial Kota Bima sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Bima adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

B. ASPEK STRATEJIK DINAS SOSIAL

1. Lingkungan Intern

- a. Daya dukung fasilitas seperti kantor, gudang tempat penitipan stock barang bantuan bencana/tanggap darurat bencana dan daya pendukung laptop/komputer.
- b. Tugas pokok dan fungsi instansi yang merupakan dasar pokok dalam melaksanakan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kota Bima.
- c. Jumlah pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sebanyak 29 orang.
- d. Terdapat 1 (satu) unit mobil tangki, 1 (satu) unit mobil dapur umum, 1 (satu) unit mobil rescue dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu unit) motor trail.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Tersedianya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Yayasan, Panti Asuhan, Orsos, LSM, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di 41 Kelurahan di Kota Bima.
- b. Tersedianya Fasilitator dan Supervisor untuk pendataan BDT dan pelayanan pengaduan kesejahteraan sosial bersama Puskesmas Kelurahan yang tersebar di seluruh Kelurahan
- c. Tersedianya potensi usaha ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilan, kualitas dan modal usaha serta pangsa pasar sehingga pengembangan usaha ekonomi kerakyatan masyarakat dapat ditingkatkan.
- d. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan masih kurang, sehingga masih perlu dimotivasi dan dibimbing agar masyarakat merasa terpanggil untuk melaksanakan pembangunan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Sosial Kota Bima Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - c. Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan

2. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Pembinaan Anak dan lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial
 - b. Seksi Jaminan Sosial
 - c. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Bima mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis dibidang sosial.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun program dan kegiatan sosial.
- c. Menyelenggarakan usaha penanganan fakir miskin dan pemberdayaan kelembagaan sosial.
- d. Menyelenggarakan Penyuluhan sosial dan pembinaan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan.
- e. Menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial pada anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat.
- f. Menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial terhadap anak nakal, tuna sosial yang meliputi PSK, pengemis, gelandangan dan eks narapidana.
- g. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan bantuan sosial terhadap keluarga miskin, korban bencana alam, korban tindak kekerasan.
- h. Menyelenggarakan bimbingan organisasi dan bantuan sosial.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum permasalahan pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bima dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi Saat ini	Standar yang digunakan	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kemiskinan	8,60 %	Menurunnya persentase atau jumlah kemiskinan	Pelayanan terhadap keluarga miskin	Kondisi data yang kurang valid	Pelayanan terhadap keluarga miskin cenderung bias dan memicu konflik sosial.
Korban Bencana Alam dan bencana Sosial	5605 Jiwa	Tertangani jumlah korban bencana alam dan bencana sosial	Pelayanan tanggap darurat terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Penanganan korban bencana menjadi kewenangan lintas sektor	Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan bencana sosial

E. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Bima memiliki 34 Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut:

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Golongan		
		SLTA	D3	S1	S2	Pria	Wanita	II	III	IV
1	Dinas Sosial Kota Bima	3	0	29	2	16	18	3	27	4

Selain itu terdapat 22 orang tenaga honorer yang mendukung kegiatan-kegiatan kedinasan. Selain itu untuk mendukung kegiatan di Tingkat Kecamatan terdapat 5 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 24 orang pendamping PKH dan untuk

menyukseskan program di tingkat Kelurahan Dinas Sosial Kota Bima memiliki mitra kerja yakni 50 orang tenaga fasilitator dan 5 orang supervisor serta 41 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK DINAS SOSIAL

Untuk mencapai optimalisasi kinerja pada Dinas Sosial Kota Bima selama 5 (Lima) Tahun kerja dengan melihat potensi dan daya dukung baik internal maupun eksternal. Untuk itu dalam menyusun rencana harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dengan penyusunan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi Organisasi Dinas Sosial Kota Bima adalah:
“Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera“.

Pengertian dan makna yang terkandung dalam visi tersebut kata kuncinya adalah :

- a. Membangun adalah upaya meningkatkan potensi sosial masyarakat melalui program dan kegiatan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.
- b. Kemandirian adalah kemampuan masyarakat membangun dirinya dalam upaya menata kehidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Kota Bima yang termasuk dalam kategori miskin, cacat, terlantar, tuna

sosial, ketertinggalan atau terpencil, korban bencana alam, bencana sosial.

d. Sejahtera adalah adanya kondisi sosial ekonomi yang baik berupa memiliki pendapatan per kapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli masyarakat yang terus meningkat.

b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut Dinas Sosial Kota Bima menetapkan misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah selanjutnya. Misi Dinas Sosial Kota Bima adalah:

Meningkatkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan secara umum pelaksanaan program atau kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bima yaitu :

Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

b. Sasaran

Adapun sasaran Dinas Sosial Kota Bima :

a. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bima memiliki tugas memberikan pelayanan dan perlindungan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK),

Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas (Cacat), Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), Korban Penyalagunaan Napza, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Keluarga Rentan, Eks. Pengidap Penyakit Kusta, dan Penduduk di Daerah Rawan Bencana.

Adapun hubungan antara Tujuan dengan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
1.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

1. Membangun sistem informasi yang baik dan transparan
2. Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Kebijakan

Kebijakan pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup:

1. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.
3. Memperkuat sistem data dan informasi Kesejahteraan Sosial Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat
4. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi serta mendata permasalahan sosial secara dini.

Tabel 3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI I : Meningkatkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			
I. Untuk meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1 . Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun.	1 . Membangun sistem informasi yang baik dan transparan	1. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.
			2. Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.
		2 . Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.	3. Memperkuat sistem data dan informasi Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja.
			4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat
		3 . Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	5. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi/mengetahui serta mendata permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi secara dini.

Adapun sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Dinas Sosial Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

VISI : Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
: Meningkatkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).				
MISI I				
I. Untuk meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Menurunnya a PMKS	1. Membangun sistem informasi yang baik dan transparan	1. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.	
			2. Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.	
			3. Memperkuat sistem data dan informasi Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja.	
		2. Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.	4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat	
		3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	5. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi/mengetahui serta mendata permasalahan sosial secara dini.	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL

Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bima telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperkuat dengan pernyataan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (terlampir) sebagai berikut :

No.	Kepala Dinas	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator	Target
1.	Esselon II	1. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yg ditangani dibagi jumlah PMKS seluruhnya	70 %

C. PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bima maka semua ASN yang menduduki eselon di lingkup Dinas Sosial Kota Bima harus memiliki Perjanjian Kinerja atas Indikator Kinerja masing-masing program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja (lampiran). Perjanjian Kinerja Dinas Sosial eselon II adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	70 %

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. 3.876.597.819	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	2. 157.500.000	
3.	Program Rehabilitasi Sosial	3. 926.281.119	
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4. 171.950.200	
5.	Program Penanganan Bencana	5. 75.321.700	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2021 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur RENSTRA mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial yang mengaju pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan- kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPA) berupa : input, output, dan outcome. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya dan juga mengukur seberapa efektifnya kegiatan – kegiatan tersebut sebagai berikut :

Pencapaian Tujuan Organisasi:

Menurunnya angka kemiskinan.

Adapun indikator dari tujuan organisasi yaitu menurunnya angka kemiskinan dengan target 8,2 %. Berikut tabel capaian tujuan organisasi Dinas Sosial Kota Bima :

Table Capaian Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1 Persentase angka . kemiskinan	8,2 %

Pencapaian Sasaran Strategis :

Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adapun pengukuran kinerja dalam pencapaian Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bima, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Secara umum Dinas Sosial Kota Bima selama Tahun 2021 telah berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dukungan APBN, APBD II, APBD, dan Dekonsentrasi pada kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Bima pada Tahun 2021. Beberapa pengukuran pencapaian indikator tersebut, diantaranya;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1 Persentase PMKS yang tertangani Formulasi: Jumlah PMKS yg ditangani -----x 100% Jumlah PMKS seluruhnya	70%	84,97	121,38 %

Adapun deskripsi secara khusus mengenai tingkat pencapaian beberapa indikator tersebut, antara lain;

1. PMKS yang ditangani

Bahwa pada tahun 2021 terdapat 31.464 (84,97%) orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dari jumlah 37.031 orang PMKS yang ada di Kota Bima. Dimana capaian tersebut melebihi target sebesar 70 % pada tahun 2021. Keberhasilan pencapaian target tersebut sangat didukung oleh ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bima yang bersumber dari APBD II, diantaranya 9 kegiatan bidang teknis yang didukung oleh 18 sub kegiatan dan 6 kegiatan rutin dengan didukung oleh 28 sub kegiatan sebagai penunjangnya. Berikut Rekapitulasi penurunan data PMKS beserta dokumentasi kegiatannya adalah :

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JML PMKS	JML TERTANGANI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Anak Balita Terlantar	0	0
2	Anak Terlantar	273	130
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	0	0
4	Anak Nakal	0	0
5	Anak jalanan	0	0
6	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	0	0
7	Anak yang berhadapan dengan hukum	0	0
8	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	0	0
9	Penyandang Disabilitas	715	233
10	Penyandang Disabilitas berat	0	0
11	Lanjut Usia Terlantar	460	460
12	Koban Tindak Kekerasan	0	0
13	Tuna Susila	0	0
14	Gelandangan	30	30
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	0	0
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0
18	Korban Penyalagunaan Napza	0	0
19	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0
20	Kelompok minoritas	0	0
21	Korban trafficking	0	0
22	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	0	0
23	Keluarga Fakir Miskin	29.460	24.518
24	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	0	0
25	Korban Bencana Alam	5.963	5.963
26	Korban Bencana Sosial	130	130
	Total	37.031	31.464

Selain dukungan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD II juga terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi, diantaranya Program

Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Program Rehabilitasi social melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta rehabilitasi Penyandang disabilitas terlantar, anak dan Lanjut Usia terlantar, Program Perlindungan dan jaminas Sosial terhadap fakir miskin dan Program Penanganan Bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial. Oleh karena kedepan diharapkan dukungan dana pendampingan dari APBD II terhadap program-program tersebut sangat membantu pencapain target pelayanan. Beberapa program yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi, antara lain :

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	2	3		4	5
1.	Asistensi Sosial Kesejahteraan Sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat) untuk Rungu Wicara	75	Orang	141.023.770	APBN
2.	Asistensi Sosial Kesejahteraan Sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat) untuk Tuna Netra	84	Orang	194.500.000	APBN
3.	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	360	Orang	864.000.000	APBN
4.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Dalam Panti	8	LKSA	88.000.000	APBD I
5.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Luar Panti	2	LKSA	117.543.000	APBN
7.	Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat	2	Kelurahan	300.000.000	APBN
8.	Program Keluarga Harapan (PKH)	8.376	KPM	21.853.725.000	APBN
T O T A L				23.558791.770	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Secara umum bahwa perbandingan pencapaian realisasi Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan pencapaian target indikator sasaran pada Dinas Sosial Kota Bima. Meningkatnya pencapaian indikator sasaran pada Dinas Sosial Kota Bima dibanding Tahun sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran dan kemampuan SDM yang ada pada Dinas Sosial Kota Bima dalam melaksanakan koordinasi.

Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
-1	-2	-3	-4			-5			-6		
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	60%	54,81 %	91,35 %	65 %	65,30 %	100,46 %	70 %	84,97 %	121,38 %

Adapun deskripsi secara khusus mengenai perbandingan tingkat pencapaian realisasi indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2019 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani sebanyak 8.061 PMKS dari 14.705 jumlah PMKS dengan persentase 54,81 % dari target 60 %. Sehingga tingkatan capaian sebesar 91,35 %. Dan untuk tahun 2020 terdapat 14.020 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

dari jumlah 21.470 orang PMKS yang ada di Kota Bima atau 65,30 % dari target 65 % sehingga tingkatan capaian mencapai 100,46 %. Kondisi penanganan PMKS pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penanganan PMKS tahun 2021 yaitu sebesar 31.464 dari jumlah PMKS 37.031 atau 84,97 % dengan target 70 % sehingga tingkat capaian mencapai 121,38 %. Kondisi meningkatnya jumlah PMKS pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya korban terdampak covid 19 tetapi tingkat capaian penanganan hingga 121,38%, dimana pencapaian target tersebut sangat didukung oleh adanya dukungan anggaran dari Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) regular, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan JPS Setara dan Program Jaminan Sosial terhadap Penyandang disabilitas dan Lanjut Usia. Oleh karena kedepannya diharapkan dukungan dana pendampingan dari APBD II terhadap program-program tersebut sangat membantu pencapai target pelayanan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Bahwa perbandingan pencapaian realisasi Tahun 2021 dengan target RPJMD menunjukkan peningkatan indikator sasaran strategis pada Dinas Sosial Kota Bima. Bahwa meningkatnya pencapaian target pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah anggaran, baik yang bersumber dari APBD II, APBN, dan dekonsentrasi. Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2021 dengan target pada RPJMD sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi Kinerja tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target RPJMD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70 %	84,97%	1121,38 %

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Bahwa realisasi kinerja Tahun 2021 sudah memenuhi target nasional yang ada. Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2021 dengan target Nasional sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Nasional	Realisasi Kinerja tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80,00%	84,97%

5. Capaian Kinerja Eselon III dan Eselon IV di Lingkup Dinas Sosial Kota Bima

Adapun capaian kinerja eselon III dan eselon IV di lingkup Dinas Sosial Kota Bima dapat diukur dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

5.1. Capaian Kinerja Eselon II

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%	84,97	121,38%

5.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretaris

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyajian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 bulan	99,34%
2	Meningkatnya kualitas penyajian laporan administrasi keuangan	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 bulan	98,34%
3	Meningkatnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 bulan	91,28%
4	Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 bulan	99,86 %

5	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	95,05%
6	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	87,78%

b. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial KAT	Persentase KAT yang Diberdayakan	30%	20%	66%
2	Terlaksananya Pengembangan PSKS yang ada Didaerah	jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	65 Orang	65 orang	100%
3	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	30 %	58 %	193%
4	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin yang Ada Didaerah	Database Data Miskin yang Terupdate	1 Dokumen	1 dokumen	100%

c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 keg	10 keg	100%
2	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	50 %	30 %	60%
3	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	100%	100%
4	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	30 %	58 %	193%
2	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi	50 %	47,62%	95,24%

	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial			
3	Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Persentase Anak-anak Terlantar yang Ditangani	30%	47,62%	142%

5.3 Capaian Kinerja Eselon IV

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik	12 Bln	12 Bln	100
2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	12 Bln	99,97
3	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Jenis	0	00,00
4	Tersedianya bahan logistik	Jumlah logistik kantor	30 Jenis	30 jenis	94,54
5	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	90714 Lembar	90714 Lembar	100
6	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	1 Media	1 media	100
7	Tersedianya bahan/material	Jumlah bahan/material yang disediakan	10 Buah	10 Buah	100
8	Terlaksananya apat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	65 Kali	65 Kali	85,58
9	Terlaksananya Cakupan penatausahaan arsip dinamis skpd	Cakupan penatausahaan arsip dinamis skpd	12 Bln	12 Bln	100

10	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	5 Unit	99,81
11	Terlaksananya sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	15 Jenis	15 Jenis	100
12	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	3300 Lembar	3294 Lembar	99,84
13	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	100
14	Terlaksananya pelayanan umum kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	98,60
15	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit	15 unit	86,97
16	Terpeliharanya peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 Unit	25 Unit	95,39
17	Terlaksananya pemeliharaan/rehab gedung kantor	Capaian gedung kantor yang direhab	100 %	0	0

b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 orang	12 orang	100
2	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100
3	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100
4	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100
5	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100
6	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	4 Dok	4 Dok	100
7	Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dok	2 Dok	100
8	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	34 Orang	34 Orang	100
9	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	15 Orang	15 Orang	100
10	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	100
11	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	4 Dok	4 Dok	100

c. Kasi Jaminan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan Dasar bagi PMKS Lainnya	Jumlah PMKS Lainnya yang menerima Akses Kelayanan Pendidikan dan kesehatan Dasar	5976 KK	8376 KK	71,34

d. Kasi Perlindungan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Tersedianya Bahan Makanan bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Makanan	5605 Jiwa	5605 Jiwa	100
2	Tersedianya Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Sandang	488 Jiwa	488 Jiwa	100
3	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Kampung Siaga Bencana	100 Orang	100 Orang	100
4	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50 Orang	50 Orang	100

e. Kasi Pengumpulan dan pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	10 dok	10 dok	100

f. Kasi Penanganan Fakir Miskin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksanakanya Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Kelompok Sasaran yang di Fasilitasi	250 KK	250 KK	100
2	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendamping KAT	Jumlah Pendamping yang Mengikuti Bimtek	60 orang	60 orang	59,94
3	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Database Fakir Miskin	1 Dok	1 Dok	100

g. Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	65 Orang	65 orang	53,68

h. Kasi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	150 orang	150 orang	150 orang

i. Kasi Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Tersedianya Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sandang	150 orang	150 orang	98,05
2	Terlaksananya Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	150 orang	150 orang	99,21
3	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan Layanan Rujukan yang Diberikan	12 Bulan	12 Bulan	75,87
4	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pemantauan dan Pemeliharaan	50 Orang	50 Orang	99,49

j. Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Tersedianya Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sandang	150 orang	150 orang	98,05
2	Tersedianya Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, yang Mendapatkan Alat Bantu	27 Orang	27 Orang	100
3	Terlaksananya Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	150 orang	150 orang	99,21
4	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	150 Orang	150 Orang	88,95
5	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan Layanan Rujukan yang Diberikan	12 Bulan	12 Bulan	75,87

k. Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	150 orang	150 orang	99,21
2	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	150 Orang	150 Orang	88,95
3	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan Layanan Rujukan yang Diberikan	12 Bulan	12 Bulan	75,87
4	Terlaksananya Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	30 Orang	30 Orang	79,31
5	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang PMKS Lainnya bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial	Jumlah Keluarga Penyandang PMKS Lainnya bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	30 Orang	30 Orang	76,21

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Sasaran strategis Dinas Sosial adalah **“Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS’**. Hal ini dimaksud adalah Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga komunitas dan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditujukan kepada :

1. Anak Balita terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
4. Anak Nakal
5. Anak Jalanan
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
7. Anak yang berhdapan dengan hukum
8. Anak dengan Kedisalitasan (ADK)
9. Penyandang Disabilitas
10. Penyandang Disabilitas Berat
11. Lanjut Usia Terlantar
12. Korban Tindak Kekerasan
13. Tuna Sosila
14. Gelandangan
15. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
16. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
17. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
18. Korban Penyalahgunaan Napza
19. Orang Dengan HIV/AIDS(ODHA)
20. Kelompok Minoritas
21. Korban Trafficking
22. Perempuan rawan Sosial Ekonomi
23. Keluarga Fakir Miskin
24. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
25. Korban Bencana Alam
26. Korban Bencana Sosial

Adapun Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tetangani thn N}}{\text{Jumlah PMKS seluruhnya thn N}} \times 100$$

Pada tahun 2021 data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebanyak 37.031 PMKS dimana sebanyak 31.464 PMKS mampu ditangani atau sebesar 121,38%.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja tersebut sangat didukung oleh kemampuan SDM yang ada pada Dinas Sosial Kota Bima yang berjumlah 30 PNS, 22 Tenaga Honor, 5 TKSK, 50 Fasilitator dan 41 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Selain itu dukungan jumlah anggaran yang bersumber dari APBN, dan dekonsentrasi Tahun 2021 meningkat dibanding dengan Tahun sebelumnya.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bahwa keberhasilan pencapaian tersebut sudah efisien mengingat sumber daya yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Bima terbatas. Kemampuan pejabat dan staf Dinas Sosial Kota Bima dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menangani pembangunan kesejahteraan sosial selama Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bima memiliki sumber daya yang terbatas, diantaranya 34 PNS, 3 (tiga) mobil operasional, dan 25 (dua puluh lima) sepeda motor. Selain jumlahnya yang terbatas, saat ini kondisi kendaraan Dinas juga mengalami kerusakan. Namun keterbatasan sumber daya yang

dimiliki tersebut tidak mengurangi semangat pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bima.

Tabel Analisa Efisiensi

No	Program	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Rasio	Ket
1	Program Pemberdayaan Sosial	66,00	67,91	0,97	Tidak efisien
2	Program Rehabilitasi Sosial	79,00	92,15	0,85	Tidak efisien
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	78,29	1,02	Sangat efisien
4	Program Penanganan Bencana	100	79,21	1,26	Sangat efisien
		243,27	242,03	1,01	efisien

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan sumber anggaran dari APBD II pada Dinas Sosial Kota Bima tahun 2021 telah melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 46 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.876.597.819,00	3.795.486.418,00	97,91%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.882.100,00	45.578.400,00	99,34%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.378.700,00	8.312.700,00	99,21%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.575.600,00	2.510.000,00	97,45%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.122.000,00	3.122.000,00	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.575.600,00	2.510.000,00	97,45%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.558.600,00	3.557.700,00	99,97%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.616.000,00	13.616.000,00	100,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.055.600,00	11.950.000,00	99,12%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.538.156.767,00	3.479.590.758,00	98,34%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.106.454.267,00	3.069.331.938,00	98,80%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.409.000,00	126.409.000,00	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.698.900,00	3.698.900,00	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.186.000,00	4.186.000,00	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.678.100,00	224.246.420,00	91,28%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.567.500,00	13.567.500,00	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.163.000,00	38.151.000,00	99,97%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.300.000,00	0,00	0,00%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.848.300,00	11.237.320,00	94,84%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.547.300,00	25.547.100,00	100,00%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
7	Penyediaan Bahan/Material	1.177.000,00	1.177.000,00	100,00%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.332.000,00	115.823.500,00	85,58%
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.743.000,00	13.743.000,00	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.950.460,00	20.921.600,00	99,86%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.028.860,00	15.000.000,00	99,81%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.921.600,00	5.921.600,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.635.992,00	225.882.880,00	95,05%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.470.000,00	89.057.100,00	98,44%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.362.892,00	15.739.080,00	64,60%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.803.100,00	121.086.700,00	98,60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.703.000,00	75.231.280,00	87,78%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.463.000,00	67.371.280,00	86,97%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.240.000,00	7.860.000,00	95,39%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00%

II	Program Pemberdayaan Sosial	157.500.000,00	106.963.900,00	67,91%
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	102.460.000,00	70.008.000,00	68,33%
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	21.460.000,00	21.460.000,00	100,00%
2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	81.000.000,00	48.548.000,00	59,94%
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	39.040.000,00	20.955.900,00	53,68%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	39.040.000,00	20.955.900,00	53,68%
III	Program Rehabilitasi Sosial	926.281.119,00	853.565.300,00	92,15%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	875.314.119,00	814.403.300,00	93,04%
1	Penyediaan Sandang	216.492.600,00	212.260.900,00	98,05%
2	Penyediaan Alat Bantu	62.335.000,00	62.049.000,00	99,54%
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	317.457.050,00	314.945.850,00	99,21%
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	27.453.000,00	24.419.000,00	88,95%
5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	251.576.469,00	200.728.550,00	79,79%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	50.967.000,00	39.162.000,00	76,84%
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	13.050.000,00	10.350.000,00	79,31%
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	13.050.000,00	9.945.000,00	76,21%
3	Pemberian Layanan Rujukan	24.867.000,00	18.867.000,00	75,87%
IV	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	171.950.200,00	134.618.000,00	78,29%
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	72.700.000,00	72.330.000,00	99,49%
1	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	72.700.000,00	72.330.000,00	99,49%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	99.250.200,00	62.288.000,00	62,76%
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	99.250.200,00	62.288.000,00	62,76%
V	Program Penanganan Bencana	75.321.700,00	59.663.000,00	79,21%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	26.265.000,00	14.755.000,00	56,18%
1	Penyediaan Makanan	16.265.000,00	4.755.000,00	29,23%
2	Penyediaan Sandang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	49.056.700,00	44.908.000,00	91,54%
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	4.475.500,00	3.960.000,00	88,48%
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	44.581.200,00	40.948.000,00	91,85%
	JUMLAH	5.207.650.838,00	4.950.296.618,00	95,06%

Berdasarkan laporan tersebut bahwa Dinas Sosial Kota Bima pada Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan teknis secara efektif sebanyak 9 kegiatan dengan 18 sub kegiatan serta 6 kegiatan rutin dengan 28 sub kegiatan yang ada di sekretariat sebagai kegiatan penunjang.

Selain itu terdapat beberapa program yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain:

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	2	3		4	5
1.	Asistensi Sosial Kesejahteraan Sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat) untuk Rungu Wicara	75	Orang	141.023.770	APBN
2.	Asistensi Sosial Kesejahteraan Sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat) untuk Tuna Netra	84	Orang	194.500.000	APBN
3.	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	360	Orang	864.000.000	APBN
4.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Dalam Panti	8	LKSA	88.000.000	APBD I
5.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Luar Panti	2	LKSA	117.543.000	APBN
7.	Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat	2	Kelurahan	300.000.000	APBN
8.	Program Keluarga Harapan (PKH)	8.376	KPM	21.853.725.000	APBN
T O T A L				23.558.791.770	

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bima memperoleh dukungan dana yang bersumber dari Dana APBD II, dekonsentrasi dan pembantuan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Dana APBD II

Dana yang bersumber dari APBD II dibiayai dengan dana sebesar **Rp. 5.207.650.838,-** (*Lima miliar dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 4.950.296.618,00,-** (*Empat miliar Sembilan ratus lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah*) atau 95.06 %. Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.876.597.819,00	3.795.486.418,00	97,91
2.	Pemberdayaan Sosial	157.500.000,00	106.963.900,00	67,91
3.	Rehabilitasi Sosial	926.281.119,00	853.565.300,00	92,15
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	171.950.200,00	134.618.000,00	78,29
5.	Penanganan Bencana	75.321.700,00	59.663.000,00	79,21
	Jumlah	5.207.650.838,00	4.950.296.628,00	95,06

2. Dana Dekonsentrasi dan APBN Non Dekonsentrasi

Pada Tahun anggaran 2021 melalui Dinas Sosial Kota Bima memperoleh dukungan dana yang bersumber dari dana APBN dan Dekonsentrasi sebesar **Rp. 23.558.791.770,-** (*Dua Puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*), - dengan realisasi

sebesar **Rp. 23.558.791.770.-** (*Dua Puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) ,- atau 100 %. Selain itu terdapat pula bantuan barang tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Bima. Secara umum bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Bima telah berhasil melaksanakan 4 (empat) program teknis yang terdiri dari 15 kegiatan yang dirincikan ke dalam 46 sub kegiatan.
2. Realisasi keuangan yang bersumber dari APBD II dari anggaran sebesar **Rp. 5.207.650.838,-** (*Lima miliar dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 4.950.296.618,00,-** (*Empat miliar Sembilan ratus lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah*). Serta dana dari APBN dan Dekonsentrasi bidang Kesejahteraan sebesar **Rp. 23.558.791.770.-** (*Dua Puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) , - dengan realisasi sebesar **Rp. 23.558.791.770.-** (*Dua Puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*). Bahwa dukungan sumber daya (SDM, anggaran dan sarana serta prasarana) pada Dinas Sosial Kota Bima mampu meningkatkan pencapaian indikator sasaran strategis yang ada. Oleh karenanya dukungan sumber daya untuk peningkatan pencapaian indikator sasaran tersebut sangat mendukung peningkatan pencapaian indikator sasaran strategis tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dapat kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. ABDUL GAWIS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631231 199103 1 181